



ANALISIS PENERAPAN ETIKA DAN PROFESIONALISME PENGANGGARAN SEKOLAH DI SMA NEGERI 5 BINJAI

Putri Anisa

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Imelda Juniarti Munthe

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Jane Olivia

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps.V Medan Estate

Korespondensi: putrianisa240322@gmail.com

Abstract. *School budgeting is a crucial instrument for achieving educational goals. Budget management, especially for School Operational Assistance (BOS) Funds, demands the enforcement of ethical pillars (transparency, accountability, honesty) and professionalism (competence and legal compliance). This descriptive research aims to describe the implementation of ethics and professionalism and identify internal and external constraints in the budgeting process at SMA Negeri 5 Binjai. Data collection techniques involved direct interviews with parties related to budgeting. The results show that the application of ethics and professionalism at SMA Negeri 5 Binjai is quite good, characterized by efforts to maintain honesty and responsibility through multilayered supervision, as well as the participation of teachers and the school committee in compiling the School Activity and Budget Plan (RKAS). Professionalism is demonstrated by compliance with the BOS Fund Technical Guidelines (Juknis) and online reporting. The main constraints faced include the limited human resources and workload of the treasurer (internal), as well as delays in BOS fund disbursement and regulatory changes (external). This study concludes that ethics and professionalism are essential foundations for accountable and transparent management of educational finances, although the issue of budget transparency at the school level remains sensitive.*

Keywords : *Ethics, Professionalism, School Budgeting, BOS Fund, Accountability.*

Abstrak. Anggaran sekolah merupakan instrumen krusial untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengelolaan anggaran, terutama Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), menuntut penegakan pilar etika (transparansi, akuntabilitas, kejujuran) dan profesionalisme (kompetensi dan kepatuhan hukum). Penelitian deskriptif ini bertujuan mendeskripsikan penerapan etika dan profesionalisme serta mengidentifikasi kendala internal dan eksternal dalam penganggaran di SMA Negeri 5 Binjai. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait penganggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika dan profesionalisme di SMA Negeri 5 Binjai sudah berjalan cukup baik, ditandai dengan upaya menjaga kejujuran dan tanggung jawab melalui pengawasan berlapis, serta partisipasi guru dan komite sekolah dalam penyusunan RKAS. Profesionalisme ditunjukkan dengan kepatuhan pada Juknis BOS dan pelaporan daring. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan SDM dan beban kerja bendahara (internal), serta keterlambatan pencairan dana BOS dan perubahan regulasi (eksternal). Penelitian ini menyimpulkan bahwa etika dan profesionalisme adalah fondasi penting untuk pengelolaan keuangan pendidikan yang akuntabel dan transparan, meskipun isu transparansi anggaran di tingkat sekolah masih sensitif.

Kata kunci : Etika, Profesionalisme, Penganggaran Sekolah, Dana BOS, Akuntabilitas.

LATAR BELAKANG

Anggaran sekolah berfungsi untuk memfasilitasi proses pendidikan berkelanjutan dan merealisasikan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan yang efektif sangat penting, tidak hanya untuk mencapai tujuan sekolah, tetapi juga untuk mendukung tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, anggaran harus dikelola berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Menurut Norsiva dan Surajjiah

(2024), pembentukan sistem keuangan pendidikan yang efisien dan dikelola dengan baik sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional di Indonesia (Norsiva, 2024).

Sebagai dana publik, pengelolaan anggaran sekolah menuntut penegakan pilar etika yang kokoh, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran (integritas). Berdasarkan Teori Keagenan pengelola dana (agen) harus bertanggung jawab penuh kepada pemangku kepentingan (prinsipal, yaitu masyarakat dan pemerintah) atas penggunaan sumber daya (Hasrianti, 2024). Transparansi informasi perencanaan dan realisasi anggaran sangat diperlukan karena, transparansi berperan historis dalam menjaga kepercayaan publik (Wele & Mildawati, 2022). Kegagalan menegakkan pilar etika berpotensi menciptakan praktik penyimpangan dan merusak kepercayaan publik (Mardiasmo, 2005).

Selain etika, pengelolaan anggaran yang efektif membutuhkan profesionalisme tinggi. Profesionalisme ini terwujud melalui kompetensi SDM dan kepatuhan terhadap peraturan. Kompetensi SDM—bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman—adalah pilar utama. Sudiarti (2020) berpendapat bahwa kompetensi SDM yang menyusun laporan keuangan adalah hal mendasar untuk menghasilkan laporan yang maksimal. Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan syarat mutlak dan kriteria utama yang digunakan BPK dalam memberikan opini atas laporan keuangan (Sudiarti & Juliarsa, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan penerapan etika dalam penganggaran sekolah.
2. Menganalisis profesionalisme pengelola anggaran sekolah.
3. Mengidentifikasi kendala internal dan eksternal dalam penganggaran sekolah.

KAJIAN TEORITIS

Penganggaran Sekolah

Anggaran dapat dipahami sebagai suatu perencanaan tertulis yang disusun secara sistematis untuk periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial. Mardiasmo (2005) mendefinisikan anggaran sebagai estimasi kinerja atau perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diantisipasi di masa mendatang. Dalam konteks pendidikan, anggaran berfungsi krusial sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Norsiva dan Surajjiah (2024) secara tegas menyatakan bahwa pembentukan sistem keuangan pendidikan yang efisien dan dikelola dengan baik sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Penganggaran modern harus berlandaskan pada prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, yang menjamin informasi mengenai tujuan dan manfaat kegiatan dapat diakses publik (Norsiva, 2024). Setyawan (2015) menguatkan pandangan ini dengan menemukan bahwa prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan produktivitas sekolah. Selain itu, prinsip Efisiensi dan Efektivitas Anggaran menuntut agar dana yang terbatas dimanfaatkan secara tepat guna dan tepat waktu untuk menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan maksimal,

menjadikannya kunci keberhasilan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan sumber pendanaan utama sekolah (Setyawan, 2015).

Etika dalam Penganggaran

Etika, yang berasal dari bahasa Yunani "*ethos*" yang berarti karakter atau kebiasaan, merupakan seperangkat prinsip moral yang menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah. Dalam pengelolaan anggaran sekolah, etika menjadi fondasi yang harus dijunjung tinggi (Hastiyanto, 2017). Salah satu pilar utamanya adalah Kejujuran (Integritas). Menurut Keraf (1998), kejujuran adalah kunci penting untuk memenuhi persyaratan perjanjian dan membangun hubungan yang baik. Kejujuran dalam penganggaran berarti menghindari segala bentuk manipulasi dan menjaga konsistensi antara perencanaan dan realisasi. Pilar lainnya adalah Keadilan, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008 merupakan pemberian akses pelayanan pendidikan yang merata tanpa diskriminasi, dan dalam hal anggaran, keadilan berarti alokasi dana yang proporsional sesuai kebutuhan. Tanggung Jawab mengharuskan pengelola siap mempertanggungjawabkan seluruh keputusan dan menerima audit.

Sementara itu, Keterbukaan (Transparansi) menjamin akses publik terhadap informasi penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan anggaran (Nasution et al., 2019). Prinsip ini memiliki peran historis dalam menjaga kepercayaan publik. Akuntabilitas yang baik sebagai pertanggungjawaban agen kepada prinsipal—merupakan indikator keberhasilan tertinggi dari penerapan etika dalam pengelolaan keuangan pendidikan (Rijal Badar, 2021).

Profesionalisme dalam Penganggaran

Profesionalisme di bidang pendidikan menuntut kompetensi tinggi dari para pelaksananya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mencakup empat kompetensi inti. Profesionalisme dalam penganggaran meliputi tiga aspek utama. Pertama, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), yang mengacu pada kemampuan individu dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan. Sudiarti (2020) berpendapat bahwa kompetensi SDM adalah hal fundamental untuk menghasilkan laporan keuangan yang maksimal dan berkualitas (Sudiarti & Juliarsa, 2020), dan hal ini sejalan dengan temuan Prayoga dan Adi (2023) mengenai pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas pelaporan keuangan. Kedua, Integritas, yang merupakan konsistensi antara nilai dan tindakan pengelola agar semua keputusan penganggaran dilakukan demi kepentingan sekolah, bukan kepentingan pribadi. Ketiga, Kepatuhan Hukum (Legal Compliance), yang menjadikan semua tindakan manajerial dan keuangan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Petunjuk Teknis (Juknis) BOS. Profesionalisme ini dipertahankan melalui peran sentral Kepala Sekolah sebagai manajer utama, dan Komite Sekolah yang menjalankan fungsi kontrol (*controlling agency*) untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas anggaran sekolah (Prayoga & Adi, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara jelas dan sistematis penerapan etika dan profesionalisme dalam proses penganggaran sekolah, tanpa menggunakan data numerik.

- Lokasi dan Waktu: SMA Negeri 5 Binjai, Sumatera Utara, pada bulan Oktober 2025.
- Subjek Penelitian: Pihak-pihak yang memiliki peran dan pengetahuan terkait proses penganggaran di sekolah, yaitu Guru atau staf administrasi.
- Teknik Pengumpulan Data: Wawancara langsung secara terbuka, berfokus pada pemahaman, pengalaman, dan pandangan responden mengenai praktik penganggaran, etika, dan profesionalisme.

Teknik Analisis Data: Data hasil wawancara dikumpulkan, disusun, dan dikelompokkan berdasarkan tema/pertanyaan, lalu ditarik kesimpulan yang menggambarkan penerapan etika dan profesionalisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Penerapan Etika dan Profesionalisme

Hasil wawancara mendalam dengan pihak pengelola anggaran di SMA Negeri 5 Binjai menunjukkan bahwa penerapan etika dan profesionalisme dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah dilakukan dengan cukup baik. Prinsip etika, terutama kejujuran dan tanggung jawab, diupayakan melalui sistem pengawasan internal berlapis. Setiap transaksi pengeluaran selalu dipertanggungjawabkan dengan melampirkan bukti dan kuitansi yang sah, serta memerlukan persetujuan dari kepala sekolah, bendahara, dan komite, yang sejalan dengan tuntutan Teori Keagenan untuk akuntabilitas (Surajiyo & Dhika, 2024).

Aspek transparansi diimplementasikan melalui kolaborasi aktif dengan guru dan komite sekolah dalam proses perencanaan, khususnya saat penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Namun, sifat keterbukaan ini masih bersifat terbatas; informasi anggaran lebih banyak disosialisasikan dalam rapat internal daripada diumumkan secara terbuka kepada seluruh warga sekolah. Sementara itu, profesionalisme terlihat dari tingginya kepatuhan hukum sekolah. Pihak pengelola secara konsisten merujuk pada Petunjuk Teknis (Juknis) BOS terbaru dan memastikan bahwa semua kegiatan yang dibiayai sudah sesuai dengan daftar penggunaan yang diperbolehkan.

Aspek akuntabilitas dipenuhi dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang teliti, diverifikasi oleh kepala sekolah, dan dilaporkan secara daring melalui sistem BOS yang terintegrasi, yang kemudian diperiksa oleh pengawas dan dinas pendidikan (Maslufi et al., 2025). Upaya meningkatkan kompetensi SDM juga telah dilakukan melalui keikutsertaan bendahara dan operator dalam bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, sesuai dengan penekanan Sudiarti (2020) mengenai pentingnya kompetensi SDM dalam menghasilkan laporan keuangan yang maksimal.

Analisis dan Identifikasi Kendala Pengelolaan Anggaran

Meskipun penerapan etika dan profesionalisme sudah baik, sekolah masih menghadapi sejumlah tantangan, baik internal maupun eksternal. Kendala internal yang dominan adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman teknis mendalam mengenai sistem pelaporan *online* dana BOS. Hal ini diperburuk oleh beban

kerja yang sangat tinggi pada bendahara sekolah, yang tidak hanya mengelola keuangan tetapi juga menangani berbagai urusan administrasi lainnya. Beban ganda ini berpotensi memengaruhi ketepatan dan ketelitian dalam pelaporan, yang merupakan inti dari profesionalisme.

Di sisi lain, kendala eksternal sering kali berasal dari perubahan kebijakan atau operasional pemerintah. Keterlambatan pencairan dana BOS menjadi masalah berulang yang memaksa sekolah menunda program-program yang telah direncanakan, bahkan terkadang harus mencari dana talangan. Selain itu, perubahan Juknis BOS yang cukup sering menuntut sekolah untuk selalu adaptif dan melakukan penyesuaian ulang terhadap rencana anggaran mereka, yang dapat memakan waktu dan sumber daya.

Sensitivitas Isu Transparansi

Secara lebih luas, hasil penelitian ini juga menyoroti sensitivitas isu transparansi anggaran di tingkat sekolah. Walaupun SMA Negeri 5 Binjai menunjukkan praktik kolaboratif dalam perencanaan, keterbukaan penuh atas rincian pengeluaran kepada publik masih sulit diimplementasikan di lapangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik terbaik (keterbukaan penuh) terkadang berbenturan dengan kenyamanan administrasi atau sensitivitas sosial di lingkungan sekolah. Isu ini menggarisbawahi tantangan dalam menegakkan prinsip transparansi seperti yang diadvokasi oleh Hood (2006) untuk membangun kepercayaan publik, di mana pengelola dana publik masih memilih untuk membatasi penyebaran informasi demi menjaga stabilitas internal. Secara keseluruhan, penganggaran di SMA Negeri 5 Binjai mencerminkan perjuangan antara tuntutan etika profesional ideal dengan realitas operasional dan kendala sumber daya di lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai studi kasus di SMA Negeri 5 Binjai, dapat disimpulkan bahwa penerapan etika dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran sekolah, khususnya Dana BOS, telah berjalan cukup baik. Sekolah menunjukkan komitmen terhadap etika melalui penegakan pilar kejujuran dan tanggung jawab dengan menerapkan sistem pengawasan berlapis dan memastikan semua pengeluaran didukung bukti yang sah, sejalan dengan tuntutan akuntabilitas dalam Teori Keagenan.

Aspek profesionalisme terwujud dalam kepatuhan hukum yang tinggi, di mana penganggaran dan pelaporan selalu mengacu pada Juknis BOS terbaru. Selain itu, akuntabilitas dipenuhi melalui pelaporan daring yang terstruktur. Meskipun demikian, penerapan transparansi masih bersifat terbatas pada forum internal (guru dan komite), mencerminkan sensitivitas isu keuangan di lingkungan sekolah.

Sekolah menghadapi dua jenis tantangan utama: internal, yaitu keterbatasan SDM yang kompeten dalam pelaporan teknis dan beban kerja bendahara yang tinggi; dan eksternal, yaitu keterlambatan pencairan Dana BOS dan perubahan regulasi yang sering terjadi. Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran di SMA Negeri 5 Binjai

mencerminkan upaya maksimal untuk menyeimbangkan antara tuntutan etika profesional ideal dengan realitas operasional dan keterbatasan sumber daya di lapangan.

DAFTAR REFERENSI

- Hasrianti. (2024). Peran Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dalam Peningkatan Profesionalisme Guru di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Hastiyanto, F. (2017). Etika dan Akuntabilitas Sektor Publik. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 75. <https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.16244>
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik : Penentuan harga pelayanan publik*. Andi.
- Maslufi, L. Z., Maryam, A., & Seno, M. F. (2025). Pengaruh Transparansi Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Sekolah. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, 10(2). <https://doi.org/10.35968/jbau>
- Nasution, D. A. D., Ramadhan, P. R., & Barus, M. D. B. (2019). *AUDIT SEKTOR PUBLIK*. Uwais Inspirasi Indonesia. www.penerbituwais.com
- Norsiva, S. (2024). PENERAPAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PENDIDIKAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DI INDONESIA. *Jurnal Skills*, 3(2), 153–162.
- Prayoga, R. F., & Adi, S. W. (2023). Pengaruh Profesionalisme, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Universitas Muhammadiyah Surakarta Abstrak*, 32, 1–10.
- Rijal Badar. (2021). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Etika terhadap Kesenjangan Anggaran. *Jurnal AKRAB JUARA*, 6, 1–12.
- Setyawan, M. H. D. (2015). Pengaruh Prinsip Keadilan, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran terhadap Produktivitas Sekolah (Persepsi Guru SMP N 3 Mertoyudan Magelang). *Universitas Negri Semarang*, 1(1), 119. <https://lib.unnes.ac.id/20689/>
- Sudiarti, N. W., & Juliarsa, G. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Locus of Control terhadap Kualitas Laporan Keuangan LPD Ni. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 3066–3080.
- Surajiyo, & Dhika, H. (2024). Teori-teori Etika Dan Peranan Prinsip Etika Bisnis Dalam Kelangsungan Usaha Perusahaan Bisnis. *Jurnal Manajemen*, 11(1), 68–76. <https://doi.org/10.37817/jurnalmanajemen.v11i1>
- Wele, M. Y. E., & Mildawati, T. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan pertanggungjawaban Keuangan Terhadap pengelolaan Anggaran Dana Bos. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(5), 1–19. <http://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/4797>.